

## Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dian Fahira<sup>1</sup>, Gusti Wulandari<sup>2</sup>, Zharifah Yustr Syifa' Hanifah<sup>3</sup>, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>[dianfahira11@gmail.com](mailto:dianfahira11@gmail.com), <sup>2</sup>[wulandarigustv@gmail.com](mailto:wulandarigustv@gmail.com), <sup>3</sup>[zharifahhanifah@gmail.com](mailto:zharifahhanifah@gmail.com), <sup>4</sup>[aridimjathi@uinkhas.ac.id](mailto:aridimjathi@uinkhas.ac.id)

### Abstrak

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak, serta menganalisis apakah penerapan sistem akuntansi telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah seperti rendahnya kesadaran pajak, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, kelemahan regulasi perpajakan, kurangnya sosialisasi, database yang belum lengkap dan akurat dan banyaknya pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedang tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan berbagai strategi supaya dapat mengurangi faktor penghambat tersebut seperti Digitalisasi Pajak Daerah dengan Aplikasi J-MBAKO (Jember Mbayar Pajak Online), Pendataan Ulang Wajib Pajak, Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan LSM dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah, Peningkatan Pelayanan di Bidang Teknologi Informasi dan Sosialisasi Manfaat Pajak kepada Masyarakat. Selain strategi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga menerapkan sistem akuntansi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

**Kata Kunci:** Badan Pendapatan Daerah, Optimalisasi Penerimaan, Pajak Daerah.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melakukan pembangunan. Untuk mencapai kemajuan yang lebih baik di sejumlah bidang, Indonesia terus melakukan upaya perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan rencana yang matang dan penerapan berbagai inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perluasan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia berkomitmen untuk mencapai visi dan misi negara menuju masa depan yang lebih menjanjikan dan sejahtera dengan melakukan upaya tersebut. Salah satunya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentunya dalam pembangunan ini membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan.

Salah satu sumber penerimaan utama suatu negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah dijelaskan dalam undang-undang yang mana kas tersebut dapat langsung digunakan oleh negara untuk pengeluaran umum (Mauliyah, *et.al.*, 2024). Pemerintah memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai salah satu jenis pungutan wajib. Selain itu, pajak juga menunjukkan seberapa aktif masyarakat atau wajib pajak berpartisipasi dalam membayar pajak untuk mendukung pendanaan negara dan inisiatif pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, kecerdasan, dan kesejahteraan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pertumbuhan regional dan nasional dalam praktiknya saling terkait erat. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan anggaran yang salah satunya bersumber dari pemungutan pajak daerah, guna memperlancar kelancaran pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah terus berupaya menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat memperkuat pembangunan di tingkat lokal maupun nasional (Marnianti, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu maupun badan usaha. Kewajiban ini bersifat mengikat dan dipungut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat dihindari oleh wajib pajak. Meskipun pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada pembayarannya, penerimaan pajak tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung berbagai kebutuhan daerah. Tujuan utama dari pemanfaatan pajak ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah (BAPENDA Jember, 2020). Pajak daerah berlaku untuk Provinsi maupun Kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun untuk Jenis Pajak

kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Fitriya, 2024).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan pertama dalam membangun Kabupaten Jember dan menjadi salah satu sumber dana yang dimiliki, di samping retribusi dan sumber penerimaan lainnya. Pembangunan Jember Nusantara yang dinikmati saat ini merupakan bentuk nyata dari pajak daerah yang dibayarkan. Untuk itu, jika penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami kenaikan dan tingkat kepatuhan juga menunjukkan grafik yang terus meningkat, maka hal ini akan berdampak terhadap terwujudnya pembangunan yang lebih maju dan modern di Kabupaten Jember.

Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, tentunya terdapat banyak faktor penghambat sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Adanya strategi yang tepat dan baik dapat mengurangi faktor penghambat tersebut. Seperti penerapan sistem akuntansi untuk mempermudah menganalisis keuangan daerah, apakah sudah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember? Dengan melihat latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah".

## METODE

### Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat semi (kurang terpol) karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap proses lapangan, tahap analisis data dan tahap pelaporan. Berikut ini adalah uraian dari tahap-tahap tersebut:

#### 1. Tahap Pra-Lapangan

Peneliti melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan. Persiapan tersebut diantaranya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, seperti Apa saja faktor yang menghambat pengoptimalisasian penerimaan pajak?, Bagaimana Strategi yang dilakukan supaya faktor penghambat tersebut dapat terselesaikan? Serta Apakah sistem akuntansi telah diterapkan di Badan pendapatan daerah jember?. Selain memberikan pertanyaan, peneliti juga melakukan observasi dengan mencari data-data sekunder, serta melakukan penjadwalan wawancara dengan informan.

#### 2. Tahap Proses Lapangan

Peneliti melakukan pengumpulan data langsung di lapangan yang berkaitan erat dengan fokus penelitian yang sedang dikaji, dengan mengambil informasi dari lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti menerapkan metode wawancara serta observasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang berkompeten, sementara observasi digunakan untuk memahami secara langsung situasi dan kondisi di lapangan. Proses pengumpulan data ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sebagai instansi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

#### 3. Tahap Analisis Data

Peneliti melakukan proses transkripsi terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian mengolah serta menyusun data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan. Seluruh data tersebut diorganisir secara sistematis dan terstruktur agar lebih mudah dipahami, dianalisis, serta disajikan dalam bentuk yang informatif dan menarik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh khalayak luas, baik untuk kepentingan akademik, pengambilan keputusan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

### Alat Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan guna mendukung analisis serta kesimpulan yang dihasilkan. Dalam prosesnya, pemahaman terhadap metode atau teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa penerapan prosedur yang tepat dalam mengumpulkan data, peneliti akan kesulitan memperoleh informasi yang valid, reliabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan metode pengumpulan data yang sistematis dan terukur sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

Adapun beberapa alat analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Interview (Wawancara)

Menurut Berger (dalam Kriyantono, 2020) Wawancara adalah suatu bentuk interaksi komunikasi yang dilakukan antara peneliti atau individu yang ingin memperoleh informasi dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu topik atau objek penelitian. Dalam konteks ini, informan merujuk pada individu yang dianggap memiliki wawasan, pengalaman, atau data yang relevan dan berharga terkait dengan aspek yang sedang diteliti. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, wawancara berfungsi sebagai alat analisis yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. Dengan teknik yang tepat, wawancara dapat membantu dalam mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya dari responden atau informan, baik dalam bentuk fakta, pandangan, maupun interpretasi mereka terhadap isu yang diteliti.

Pada wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth* interview, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan Masing-masing kepala bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya Program Kerja, Faktor yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah dan bagaimana Strategi yang harus dilakukan dalam mencegah faktor penghambat tersebut, serta Apakah Sistem Akuntansi telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## 2. Observasi

Menurut Hardani (2020) Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung. Observasi pada dasarnya berfokus pada pengamatan terhadap perilaku yang tampak serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku yang diamati dapat berupa tindakan yang terlihat secara langsung oleh mata, suara yang dapat didengar, pola yang dapat dihitung, serta aspek yang dapat diukur dengan berbagai metode ilmiah. Tujuan utama dari observasi adalah untuk mendeskripsikan secara rinci lingkungan atau lokasi yang menjadi objek pengamatan, termasuk kondisi fisik, suasana, serta berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika di dalamnya. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk mencatat dan menganalisis berbagai aktivitas yang terjadi, individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta pola perilaku yang muncul selama berlangsungnya aktivitas.

Lebih jauh, observasi berusaha memahami dan menginterpretasikan makna dari setiap kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Dengan demikian, observasi tidak hanya berfokus pada pengumpulan data secara objektif, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam dari setiap interaksi dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan yang diamati (Herdiansyah, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Observasi Berperanserta (*Participant Observation*) yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan ikut melakukan pekerjaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, serta mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan manajemen kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Pajak Daerah seperti melihat kinerja para pegawai dalam mengelola Pajak Daerah secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember pada awalnya merupakan bagian dari sejarah perkembangan Biro Keuangan Kabupaten Jember dengan nama Sub Bagian Sumber Penghasilan. Sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah. Seiring dengan pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui partisipasi masyarakat serta bertambahnya beban tugas yang harus ditangani oleh Biro Keuangan, struktur organisasi pun mengalami perubahan. Perkembangan yang pesat dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah mengarah pada perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Hal ini mendorong peningkatan status dari sub bagian menjadi sebuah dinas yang lebih luas dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember yang mengacu pada SK Gubernur Jawa Timur No. 59/REG/15/D/A-F-68, yang secara resmi menetapkan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan struktur organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah serta penyempurnaan sistem administrasi. Penyusunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan pada 12 Maret 1979, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 39 Tahun 1992 mengenai susunan organisasi dan tata kerja BAPENDA Kabupaten Jember (BAPENDA Jember, 2021).

Dengan memasuki era otonomi daerah, Kabupaten Jember mengalami berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Nomor 34 Tahun 2004. Seiring dengan perkembangan kebijakan, muncul pula Perda Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta Perda Nomor 41 Tahun 2007 yang membahas struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, dilakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap struktur OPD melalui Perda Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) mengalami perubahan menjadi Badan Pendapatan Daerah, yang berstatus sebagai badan dan bukan lagi dinas. Pergantian status ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 yang mengatur secara rinci tugas, fungsi, serta tata kerja BAPENDA. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara teknis dan administratif, BAPENDA memiliki tugas utama dalam mengelola sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi dan pajak daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan serta kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Jember.

### Faktor yang Menghambat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaiannya, di antaranya:

#### 1. Rendahnya Kesadaran Pajak

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat literasi pajak yang minim. Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah, sehingga mereka enggan atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, persepsi negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak hanya membebani masyarakat tanpa memberikan manfaat langsung, semakin memperburuk kepatuhan pajak.

## 2. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Daerah

Pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sistem perpajakan menyebabkan berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Ketidaktegasan dalam penegakan aturan, kurangnya mekanisme pemantauan yang ketat, serta lemahnya sanksi bagi pelanggar perpajakan membuat penerimaan pajak daerah tidak optimal. Tanpa adanya pengawasan yang baik, banyak potensi pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan justru hilang.

## 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan pajak daerah sering kali kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kurangnya tenaga ahli yang menguasai sistem perpajakan, teknologi informasi, serta strategi pemungutan pajak menyebabkan proses administrasi pajak berjalan tidak efisien. Selain itu, minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pajak daerah semakin memperburuk situasi, menghambat peningkatan kualitas layanan perpajakan.

## 4. Kelemahan Regulasi Perpajakan

Peraturan perpajakan daerah yang tidak jelas, tumpang tindih, atau bahkan sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dapat menjadi penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak. Ketidaktepatan regulasi menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak mereka. Selain itu, adanya celah hukum dalam regulasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari pajak secara legal, sehingga potensi penerimaan pajak daerah menjadi berkurang.

## 5. Kurangnya Sosialisasi

Minimnya sosialisasi tentang kewajiban dan manfaat membayar pajak membuat banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem perpajakan daerah. Pemerintah daerah sering kali kurang aktif dalam menyelenggarakan program edukasi pajak yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

## 6. Database yang Belum Lengkap dan Akurat

Salah satu faktor teknis yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah kualitas database perpajakan yang belum memadai. Data yang tidak akurat atau tidak terintegrasi dengan baik menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi wajib pajak yang belum terdaftar, menilai potensi pajak yang dapat dipungut, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa sistem database yang solid, pemungutan pajak menjadi kurang efisien, rentan terhadap kebocoran penerimaan, serta menyulitkan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang tepat.

## 7. Banyaknya pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedang tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah tingginya jumlah pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun tarif pajak yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, banyak wajib pajak yang mengajukan keringanan atau pengurangan pembayaran dengan berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi yang sulit, keberatan atas nilai jual objek pajak (NJOP), atau faktor sosial lainnya. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu, jika pengajuan pengurangan PBB tidak dikaji secara ketat, potensi kebocoran penerimaan pajak semakin besar. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Secara keseluruhan, berbagai faktor di atas harus diatasi dengan kebijakan dan strategi yang tepat agar penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan.

## Strategi yang di Terapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah

Optimalisasi penerimaan pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak guna memaksimalkan pendapatan daerah (Khairunnisa, dkk. 2023).

Berdasarkan visi Kabupaten Jember yang tertancup dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember (BAPENDA Jember, 2022) yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, di antaranya:



1. Digitalisasi Pajak Daerah dengan Aplikasi J-MBAKO (Jember Mbayar Pajak Online) (BAPENDA Jember, 2023)  
Bapenda Jember telah meluncurkan aplikasi J-MBAKO sebagai langkah digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya secara daring, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak. Selain itu, dengan sistem digital, potensi kebocoran pajak dapat diminimalkan karena setiap transaksi tercatat dengan jelas. Aplikasi ini juga memungkinkan wajib pajak untuk mengecek tagihan, riwayat pembayaran, serta mendapatkan notifikasi terkait jatuh tempo pajak.
2. Pendataan Ulang Wajib Pajak  
Salah satu langkah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan pendataan ulang wajib pajak. Pendataan ini mencakup verifikasi data pemilik usaha, pemilik properti, serta wajib pajak lainnya yang berkewajiban membayar pajak daerah. Dengan data yang lebih akurat dan terkini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua wajib pajak telah terdaftar dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendataan ulang ini juga dapat mengidentifikasi potensi wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar, sehingga cakupan pajak daerah dapat diperluas.
3. Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan LSM dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah  
Bapenda Jember juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki jaringan luas dan keahlian dalam manajemen keuangan serta sosialisasi pajak. Misalnya, bank dan fintech dapat bekerja sama dalam penyediaan kanal pembayaran pajak yang lebih mudah dan fleksibel. Sementara itu, LSM dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan.
4. Peningkatan Pelayanan di Bidang Teknologi Informasi  
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak. Bapenda Jember terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan nyaman. Selain aplikasi J-MBAKO, terdapat beberapa layanan untuk pembayaran pajak sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti Bank BRI, kantor pos, indomart, alfamart, griya bayar bapenda, toko pedia, gopay, dan ovo.
5. Sosialisasi Manfaat Pajak kepada Masyarakat  
Kesadaran masyarakat terhadap manfaat pajak daerah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Jember secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui seminar, media sosial, maupun penyuluhan langsung ke komunitas-komunitas lokal. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan daerah, seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat lebih bersedia dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.  
Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Bapenda Jember berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pembangunan daerah Jember Nusantara secara mandiri.

### **Penerapan Sistem Akuntansi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 70 Ayat 1, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan yang mencakup serangkaian proses sistematis dalam mengelola data transaksi serta kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan daerah. Proses ini meliputi pencatatan yang akurat dan terperinci, penafsiran data keuangan untuk analisis lebih lanjut, serta peringkasan informasi keuangan agar dapat disajikan dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh proses pencatatan dan pelaporan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah secara objektif, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan pendapatan daerah, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan menjadi hal yang sangat penting. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan transaksi pendapatan daerah. Dengan SIMDA Keuangan, setiap transaksi pajak daerah dapat tercatat secara jelas, mulai dari tahap penerimaan hingga pelaporan kepada pemerintah daerah. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengawasan realisasi pendapatan daerah dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi e-Pajak dengan sistem perbankan, e-commerce, dan layanan pembayaran digital semakin mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya berbagai opsi pembayaran seperti mobile banking, internet banking, dompet digital, serta gerai ritel modern, masyarakat dapat membayar pajak secara lebih fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Selain meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, integrasi ini juga mempercepat proses pencatatan pendapatan daerah secara real-time, mengurangi risiko penyelewengan, serta meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak daerah.

Pendekatan akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan pendapatan daerah diterapkan untuk mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara lebih akurat. Pendekatan akuntansi berbasis akrual Seperti: Sistem Akuntansi Pengeluaran

Kas, Penerimaan Kas; Sistem Akuntansi Aset, Sistem Akuntansi Kewajiban, Sistem Akuntansi Ekuitas, Sistem Akuntansi Selain Kas; Sistem Akuntansi Pelaporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam sistem ini, pendapatan daerah dicatat sejak hak atas penerimaan pajak timbul, bukan hanya saat kas diterima. Sebagai contoh, jika terdapat piutang pajak yang jatuh tempo, jumlah tersebut tetap dicatat sebagai pendapatan meskipun pembayaran belum diterima. Dengan metode ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi penerimaan pajak di masa mendatang, sehingga perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain meningkatkan akurasi pencatatan, penerapan sistem akrual juga memerlukan rekonsiliasi data secara berkala antara Bapenda, Bank Jatim sebagai lembaga penerima pembayaran pajak, serta Badan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas daerah. Proses rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi daerah, sehingga potensi selisih pencatatan atau kehilangan data penerimaan pajak dapat diminimalkan. Dengan strategi ini, Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengoptimalisasian penerimaan pajak Daerah seperti Rendahnya Kesadaran Pajak, Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Daerah, Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Kelemahan Regulasi Perpajakan, Kurangnya Sosialisasi, Database yang Belum Lengkap dan Akurat dan Banyaknya pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedang tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan berbagai Strategi supaya dapat mengurangi faktor penghambat tersebut seperti Digitalisasi Pajak Daerah dengan Aplikasi J-MBAKO (Jember Mbayar Pajak Online, Pendataan Ulang Wajib Pajak, Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan LSM dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah, Peningkatan Pelayanan di Bidang Teknologi Informasi dan Sosialisasi Manfaat Pajak kepada Masyarakat. Selain strategi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga menerapkan sistem akuntansi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Dengan SIMDA Keuangan, setiap transaksi pajak daerah dapat tercatat secara jelas, mulai dari tahap penerimaan hingga pelaporan kepada pemerintah daerah. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengawasan realisasi pendapatan daerah dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang tiada batas kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ari Fahimatussyam Putra Nusantara S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing serta memberikan arahan
6. Bagas Wahyudi Witjaksono, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
7. Nur Amala, S.E. selaku Dosen Pamong yang telah sudi dalam memberikan arahan serta bimbingannya selama kami melaksanakan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
8. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a restu kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah 2 yang sudah memberikan semangat serta motivasinya untuk kami sehingga kami dapat terus berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan yang harus kami lalui.
10. Dan untuk yang terakhir kalinya kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan laporan pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember. (2020). *Buku Kerja*. Jember: Bapenda
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember. (2021). *Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*. Diakses dari <https://bapenda.jemberkab.go.id/sejarah> pada tanggal 21 Februari 2025
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember. (2022). *Perubahan Rencana Strategis 2021-2026*. Jember: Bapenda
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember. (2023). *Capacity Building Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan dan Optimalisasi Aplikasi Pajak Daerah J-MBAKO*. Diakses dari <https://bapenda.jemberkab.go.id/sejarah> pada tanggal 21 Februari 2025
- Mauliyah, Nur Ika, Dkk. (2024). *Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan, 2(2), 41-45.

- Fitriya. (2023). *Jenis Pajak Daerah, Tarif, dan Ketentuan Pembayaran*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/> pada tanggal 21 Februari 2025.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairunnisa, D., Setiyono, B., Erowati, D. (2023). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2023 dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam*.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis*. Jakarta : Kencana.
- Marnianti. (2018). *Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Sugiyono. (2020). *Metode Pnelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.